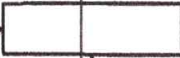
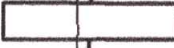


 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	NOMOR SOP	: 050/0103/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Daerah,  Akhmad Sugiharto, S.T., M.T. NIP. 197305171998031007
NAMA SOP	PENGAJUAN POKOK POKOK PIKIRAN (POKIR) DPRD DALAM APBD	
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 3 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah		1. Memahami Alur Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Menguasai penggunaan teknologi informasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1 SOP Penyusunan RKPD dan Renja PD 2 SOP Penyusunan APBD 3 SOP Pelaksanaan Reses		1. Komputer 2. Internet
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dijalankan sesuai standar baku mutu waktu, akan menghambat proses penyusunan RKPD. Aplikasi SIPD dikembangkan oleh Kemendagri, sehingga Pemkab tidak dapat melakukan modifikasi/perbaikan apabila terjadi kesalahan sistem.		1 Daftar Usulan Hasil Reses DPRD 2 Hasil Verifikasi Sekretariat 3 Hasil Verifikasi PD Teknis 4 Daftar Usulan Hasil/Reses yang didanai

SOP PENGAJUAN POKOK POKOK PIKIRAN (POKIR) DPRD DALAM APBD

No	Kegiatan	Muta Baku									Mutu Baku			Keterangan
		Bapperida	DPRD	Set DPRD	Perangkat Daerah	TAPD	Banggar	Bupati	BPKPAD	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Akun Anggota DPRD di SIPD										Nama anggota, fraksi anggota, dapl anggota, username, alamat, NIK, email, no telepon	2 hari	Akun Anggota DPRD	
2	Membuat Kamus Usulan di SIPD										Daftar permasalahan dan template pekerjaan per urusan pemerintahan	3 hari	Kamus Usulan	
3	Menginput Usulan di SIPD										SE Arah kebijakan dan Penyampaian pikir, Daftar hasil reses, FGD, Studi komparasi, Laporan kunjungan kerja dalam daerah, proposal pekerjaan	44 Hari	Usulan pokkir	- Pengajuan usulan kepada (Kab/kota), usulan (dari kamus usulan), permasalahan, alamat (Lokasi), surat proposal dan foto lokasi (jika ada). - Batas waktu 1 Minggu sebelum musrenbang
4	Melaksanakan Validasi Usulan										Data input usulan Reses		Usulan Reses tervalidasi Set. DPRD	Set. DPRD memberi rekomendasi Bisa menolak usulan, mengembalikan usulan atau memprosesnya. Jika setuju maka lanjut ke Bapperida untuk validasi usulan. Jika tidak setuju maka dikembalikan ke DPRD untuk perbaikan.
5	Melaksanakan Validasi Usulan										Usulan Reses tervalidasi Set. DPRD		Usulan Reses tervalidasi Bapperida	Bapperida memberi rekomendasi: kelompok belanja, uraian rekomendasi (keterangan). Bisa menolak usulan, mengembalikan usulan atau memprosesnya. Jika setuju maka lanjut validasi usulan PD (meneruskan usulan pokkir sesuai tugas dan fungsi OPD). Jika tidak setuju maka usulan yang dikembalikan dapat diperbaiki judul permasalahan.
6	Melaksanakan Validasi Usulan										Usulan Reses terverifikasi Bapperida		Usulan Reses terverifikasi PD	-Verifikator OPD memberi rekomendasi: sub kegiatan, uraian rekomendasi (keterangan), volume satuan dan anggaran sesuai ASB. Jika setuju lanjut menyelenggarakan musrenbang kabupaten. Jika tidak setuju karena tidak sesuai kevenangan dan Tusi, dikembalikan. - mengecek kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, dapat dilakukan verifikasi lapangan
7	Menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten										Rancangan RKPD usulan pokkir terverifikasi perangkat daerah usulan musrenbangcam	1 hari	BA Hasil Musrenbangkab	Membahas rancangan RKPD dan usulan masyarakat
8	Menyusun Rancangan Akhir RKPD										BA Musrenbangkab	10 hari	Rancangan Akhir RKPD	Memperbaiki rancangan RKPD sesuai kesepakatan Musrenbangkab
9	Membahas Rancangan Akhir RKPD										Rancangan Akhir RKPD	30 Hari	Rancangan Akhir RKPD	Membahas usulan perangkat daerah, usulan masyarakat, dan usulan pokkir yang dapat dibiayai sesuai ketersediaan anggaran
10	Melaksanakan Sinkronisasi bersama										Pokkir yang terverifikasi perangkat daerah	2 hari	Pokkir yang disepakati bersama	

No	Kegiatan										Mutu Baku			Keterangan
		Bapperida	DPRD	Set DPRD	Perangkat Daerah	TAPD	Banggar	Bupati	BPKPAD	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
														
11	Memverifikasi Usulan										Pokkir yang disepakati bersama	4 hari	Pokkir yang yang disetujui TAPD	TAPD memverikasi pokir yang telah disinkronisasi bersama. Jika setuju lanjut menyempurnakan rincin belanja. Jika tidak setuju maka perlu perbaikan atau sinkronisasi bersama kembali.
12	Menyempurnakan rincian belanja										Pokkir yang diakomodir TAPD	5 hari	Pokkir yang diakomodir dalam RKPd	Perangkat Daerah menginput pokir dalam Renja PD
13	Menyempurnakan Raperbup										Pokkir yang diakomodir dalam RKPd	3 hari	Menyempurnakan Raperbup RKPd yang telah disempurnakan	
14	Menetapkan RKPd										Raperbup RKPd	1 hari	Perbup RKPd	
15	Menyusun Rancangan KUA - PPAS										Perbup RKPd	5 hari	Rancangan KUA-PPAS	
16	Menyampaikan rancangan KUA - PPAS										Rancangan KUA-PPAS	5 hari	Rancangan KUA-PPAS	- Rancangan KUA - PPAS diserahkan oleh BPKPAD ke Bupati melalui Ketua TAPD setelah direviu APIP -Bupati menyampaikan rancangan KUA PPAS ke DPRD
17	Membahas rancangan KUA - PPAS										Rancangan KUA-PPAS	3 hari	Rancangan KUA-PPAS	substansi pembahasan meliputi pagu per OPD, termasuk pokir. Pembahasan dapat dilanjutkan oleh Komisi
18	Melanjutkan pembahasan rancangan KUA PPAS										Rancangan KUA-PPAS	10 hari	Risalah rapat	pembahasan dilaksanakan oleh komisi
19	Melaksanakan rapat konsultasi pimpinan DPRD										Risalah rapat	2 hari	laporan konsultasi pimpinan DPRD Risalah Rapat pimpinan DPRD	rapat diikuti oleh pimpinan DPRD, ketua fraksi, pimpinan komisi, BK, Bapemperda
20	Menyelaraskan hasil rapat konsultasi pimpinan										Risalah rapat	1 hari	Pendapat dan saran	banggar dengan TAPD
21	Meneruskan hasil pendapat dan saran DPRD kepada Perangkat Daerah										laporan konsultasi pimpinan DPRD/ Risalah Rapat pimpinan DPRD	3 hari	Input RKA di SIPD sesuai Laporan konsultasi pimpinan DPRD/Risalah rapat	BPKPAD
														

No	Kegiatan										Mutu Baku			Keterangan
		Bapperida	DPRD	Set DPRD	Perangkat Daerah	TAPD	Banggar	Bupati	BPKPAD	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
														
33	Mengirim persetujuan APBD										Buku Raperda dan Raperbup APBD	1 hari	APBD	Paripurna DPRD tentang persetujuan APBD
34	Mengirim evaluasi RAPBD ke Gubernur										APBD, PENJABARAN APBD, RKPD	14 hari	RAPBD	Menyiapkan RAPBD ke Gubernur untuk dievaluasi
35	Menerima hasil evaluasi Gubernur terhadap RAPBD										RAPBD	1 hari	Hasil Evaluasi Gubernur	Bupati dan DPRD
36	Membahas evaluasi RAPBD										Hasil Evaluasi Gubernur	7 hari	RAPBD	Banggar dan TAPD, termasuk pekerjaan yang merupakan pokok pikiran
37	Menyempurnakan RAPBD										RAPBD	3 hari	RAPBD	OPD DAN BPKPAD
38	Menetapkan APBD							 			RAPBD	sebelum akhir tahun	Perda APBD	BPKPAD, Bag Hukum Setda, Biro Hukum Propinsi



Sekretaris Daerah,

Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007